

ABSTRAK

Pasal 33 Ayat 3 UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa bumi, air dan ruang angkasa digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat sehingga jelas diamanatkan kepada semua pihak dan khususnya kepada Pemerintah agar mengelola administrasi tanah dengan sebaik-baiknya guna kesejahteraan seluruh rakyatnya. Terhadap lahirnya sertipikat hak atas tanah harus dapat menjamin kepastian hukum bagi pemiliknya. Pada kenyataannya hingga saat ini, apa yang disebutkan di atas belum sepenuhnya dapat dilaksanakan dengan baik sehingga penguasaan atau pemilikan tanah oleh masyarakat atau lembaga atau badan, belum mendapat perlindungan hukum yang tetap dan pasti oleh Pemerintah. Sebagai contoh saat ini masih ditemui adanya sertipikat hak atas tanah *ganda* atas sebidang tanah dengan subjek hak yang berbeda.

Penulis disini membatasi diri terhadap persoalan sertipikat hak atas tanah yang *overlap* secara penuh (batas dan lokasinya sama), dengan perumusan masalahnya yaitu mengapa terjadi adanya sertipikat hak atas tanah *ganda*, bagaimana akibat hukum adanya sertipikat hak atas tanah yang *ganda* dan bagaimana penyelesaiannya apabila ditemukan sertipikat hak atas tanah *ganda* di wilayah kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Propinsi Jawa Tengah.

Metode penelitian yang penulis gunakan untuk memperoleh data adalah Metode Pendekatan *yuridis sosiologis (socio-legal research)* yaitu merupakan penelitian hukum yang menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan, meneliti efektivitas suatu Undang-Undang dan Penelitian yang ingin mencari hubungan (korelasi) antara berbagai gejala atau variabel sebagai alat pengumpul datanya terdiri dari studi dokumen, pengamatan (observasi), dan wawancara (*interview*).

Hasil penelitian yang merupakan kesimpulan dan saran dari bahasan terhadap permasalahan tesis ini semoga bermanfaat bagi semua pihak sebagai pemerhati terhadap persoalan sertipikat hak atas tanah *ganda*. Garis besar kesimpulan adalah alas hak yang dipergunakan sebagai bukti kepemilikan sering tidak valid, Pemetaan yang belum dilaksanakan secara benar oleh BPN, tanah yang tidak dipelihara dan dimanfaatkan oleh pemiliknya. Akibat hukum dari sertipikat tanah *ganda* adalah terjadinya sengketa kepemilikan, tidak terdapat kepastian hukum, pemilik tanah yang sebenarnya merasa dirugikan dan menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap sertipikat tanah. Penyelesaian terhadap permasalahan sertipikat hak atas tanah *ganda*, dapat ditempuh dengan beberapa cara yaitu secara sukarela para pihak yang bersengketa melakukan kesepakatan sendiri dalam menyelesaikan masalahnya, melalui mediasi yaitu proses penyelesaian sengketa di mana pihak ketiga yang membantu proses penyelesaian sengketa atau melalui proses peradilan umum. Sebagai saran agar tidak terjadi sertipikat tanah *ganda* yaitu pemilik tanah memasang tanda batas tanah miliknya, administrasi desa tentang tanah agar dilakukan dengan sebaiknya, dan BPN memelihara peta dan mengelola sebagaimana mestinya.

Kata kunci : Akibat hukum, sertipikat tanah *ganda*.

ABSTRACT

Article 33 Paragraph 3 NRI 1945 Constitution which states that the earth, water and air space is used as much as possible for the prosperity of the people so clearly mandated to all parties and in particular to the Government to manage the land administration as well as possible for the welfare of all citizens. The birth certificate of land rights should be able to ensure legal certainty for the owner. In fact, until today, what is mentioned above has not been fully implemented so well that possession or ownership of land by public or private institutions or agencies, has not received permanent legal protection and certainly by the Government. For example, it is still met the dual certificate of land rights over a plot of land with rights of different subjects.

Author here confine ourselves to the question of the certificate of land rights overlap fully (limit and the same location), the formulation of the problem that is why the existence of the certificate of land rights double, what legal effect the certificate of land title double and how the solution if found certificates multiple land rights in the work area Land Agency Regional Office of Central Java Province.

The research method I use to obtain the data is Approach juridical sociological (socio-legal research) which is a legal research using secondary data as the data initially, followed by primary data or field data, examined the effectiveness of a Law and Research want to find a relationship (correlation) between the various symptoms or variable as a means of collecting data consisted of document study, observation (observation), and interviews (interview).

Results of research are conclusions and suggestions from the discussion of the problems of this thesis may be useful for all parties as an observer to the question of land rights certificate double. An outline of the conclusions is the right base that is used as proof of ownership is often not valid, mapping that has not been done correctly by the BPN, the land is not maintained and utilized by their owners. The legal consequences of the double title deed is the ownership dispute, there is no legal certainty, the actual owner of the land who feel harmed and caused public distrust of the title deed. Completion of the certificate of land rights issues double, can be reached in several ways, namely voluntarily the disputing parties conduct their own agreement in solving the problem through mediation is a process of dispute resolution in which the third party to help the process of resolving the dispute through the judicial process or the public. As a suggestion to avoid the double title deed land owners put up a sign that his property boundaries, the village administration on the ground that should be done, and BPN maintain maps and manage accordingly.

Keywords: Due to the legal, title deed double.